

# STRATEGIC IMPACT

*Understanding past, present and future of the World*



## AMERIKA SERIKAT (AS) SEMAKIN MENANCAPKAN

pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik dengan menandatangani perjanjian militer bersama Papua New Guinea (PNG). Perjanjian itu diresmikan pada 22 Mei 2023 didahului oleh rencana kunjungan Presiden Joe Biden untuk pertama kali ke negeri dengan penduduk terbanyak di Kawasan Pasifik. Namun, Biden urung berkunjung (17/5/2023) karena sedang menghadapi masalah domestik/negosiasi anggaran dengan Kongres AS, tapi perjanjian tetap dilanjutkan.



*Penandatanganan Kerjasama Militer AS dan PNG (22/5/2023)*

## Kerjasama Militer AS dengan PNG dan Filipina, serta Potensi Perang Hegemonik di Kawasan Asia Tenggara

Tim Pengkaji

Butir-butir kerjasama militer masih akan diungkapkan beberapa bulan yang akan datang, tapi protes sudah dilakukan oleh mahasiswa dan akademisi PNG. Mereka khawatir kemerdekaan politik dan kedaulatan wilayah PNG akan terganggu.

Michael A. Allen (Boise State University), Carla Martinez Machain (University at Buffalo) dan Michael E. Flynn (Kansas State University) yang menulis buku tentang pengerahan militer AS di mancanegara mengungkapkan: mengapa AS mau bekerjasama dengan negara kecil-lemah dan bagaimana kompetisi geopolitik dengan Republik Rakyat China (RRC) berpengaruh terhadap kerjasama militer AS? Secara formal, pemerintah PNG menyatakan bahwa kerjasama dengan AS bertujuan untuk mendukung kekuatan pertahanan PNG dan meningkatkan stabilitas regional (The Conversation, 26/5/2023). Namun detail perjanjian masih belum terbuka ke publik, sehingga sulit untuk mengukur dampaknya secara kongkrit.



PNG adalah negara terbesar di Kawasan Pasifik dengan penduduk sekitar 10 juta dan kekuatan militer aktif hanya 3.000 personel. Kerjasama militer dengan AS akan meningkatkan belanja/bantuan militer PNG hingga 8.400 kali dari anggaran militer rutin tahunannya. Posisi PNG hanya 90 mil laut dari Australia, dimana AS telah memiliki pangkalan militer sendiri, sehingga mempermudah jangkauan ke wilayah Asia. Dalam sejarahnya, wilayah PNG pernah dijajah Inggris tahun 1800-an dan kemudian dikontrol Australia pada tahun 1900-an, hingga merdeka tahun 1975. Perbatasan sebelah barat PNG adalah provinsi Papua yang menjadi bagian dari Republik Indonesia, sehingga kerjasama itu akan berdampak strategis bagi kedua negara.

Ketika AS membangun kerjasama militer dengan negara kecil seperti Kolombia dan Kenya, maka ada kepentingan lebih luas untuk mengawasi kawasan sekitarnya, yakni Amerika Latin dan Afrika tengah. Dengan sisa kekuatan militernya, AS masih berusaha menjadi polisi dunia, meskipun sedang menghadapi tekanan domestik sendiri. Sementara itu, kekuatan dan pengaruh RRC juga semakin merambah Asia dan Afrika dengan membangun kesepakatan militer bersama Kepulauan Solomon, Djibouti dan Thailand. Terjadi sejumlah insiden yang menunjukkan ketegangan antara AS dan RRC, salah satunya tatkala Angkatan Udara AS menembak jatuh balon udara RRC

(yang diduga sebagai alat pengintai mata-mata) di atas wilayah AS pada awal 2023.

Sebelumnya, pada awal Februari (2/2/2023), AS menyepakati perluasan kehadiran militer AS dengan pemerintah Filipina. Berdasarkan perjanjian baru itu, AS lebih mudah melindungi Taiwan dari ancaman RRC. Taiwan yang berjarak 118 mil atau 190 kilometer dari Filipina telah menyatakan diri merdeka, sementara RRC masih menganggapnya provinsi yang terlepas dan hendak merebut kembali. Perjanjian baru dengan Filipina memperbarui kesepakatan yang telah diteken sejak 2014 dan memperluas akses kepada empat pangkalan militer baru dengan tambahan anggaran USD 82 juta bagi pembangunan infrastruktur. Dengan tambahan itu, berarti AS menguasai 9 pangkalan militer di Filipina, kehadiran militer paling ekspansif sepanjang 30 tahun terakhir. Pada Oktober 2022, AS mengumumkan bantuan militer hingga USD 100 juta untuk militer Filipina.

Pengerahan militer AS memberikan sinyal kepada RRC yang juga meningkatkan kekuatan militernya, terutama di kawasan Laut China Selatan. Menteri Pertahanan AS Llyod J. Austin menyatakan kesepakatan baru dengan Filipina penting untuk melatih dan mengintegrasikan kekuatan militer Filipina dan AS, serta meningkatkan kemampuan untuk merespon ancaman regional. Sementara Jurubicara Kementerian Luar Negeri RRC, Mao Ning, menanggapi bahwa hal itu akan mengeskalasi ketegangan dan membahayakan kedamaian serta stabilitas regional.

Persepsi warga Filipina sendiri terhadap pengaruh AS dan RRC menarik dicermati. Dalam survei yang dilakukan Allen, Flynn dan Machain pada periode 2018 terlihat 47,9 persen responden menyatakan positif dan 19,9 persen sangat positif; sedangkan 25,4 persen menyatakan tidak positif atau negatif (netral). Kecenderungan positif meningkat pada tahun 2019 menjadi 52,8 persen dan tahun 2020 menurun 47,1 persen. Sementara itu, persepsi warga Filipina terhadap pengaruh RRC pada tahun 2018 lebih banyak netral (37,6 persen) dibandingkan positif 32,7 persen. Lalu pada tahun 2019 yang netral menjadi 40,7 persen dan positif 23,6 persen, serta cenderung negatif 20,1 persen. Pada tahun 2020 yang netral meningkat 41,2 persen, positif 21,5 persen dan cenderung negatif 19,6 persen. Walaupun persepsi public cenderung positif, demonstrasi anti-pangkalan militer AS tetap merebak di Filipina, dan pemerintah setempat menerapkan tindak kekerasan terhadap para demonstran.

## Pengaruh untuk Indonesia

Kerjasama militer AS dengan PNG relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia karena kebijakan luar negeri PNG yang cukup bersahabat, mendukung kedaulatan wilayah Papua dan tidak mendukung gerakan separatis Papua Merdeka. Pada 3 Oktober 2017, Komisi I DPR RI melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence). Pembahasan tersebut kemudian menjadi UU Nomor 14 Tahun 2017.

Ada beberapa pertimbangan sehingga persetujuan itu dilakukan. Pertama, sangat penting bagi Indonesia menjaga keamanan bersama-sama dengan negara di kawasan termasuk dengan PNG yang merupakan anggota Forum Kepulauan Pasifik bersama dengan Fiji, Indonesia, New Caledonia, Solomon Islands, dan Vanuatu. PNG juga masuk dalam negara anggota Kelompok Rumpun Melanesia bersama Australia, Kiribati, New Caledonia, Tuvalu, Cook Islands, Marshall Islands, New Zealand, Samoa, Vanuatu, Fiji, Micronesia, Niue, Solomon Islands, French Polynesia, Nauru, Palau dan Tonga. Selain itu juga PNG merupakan anggota Dialog Pasifik Barat Daya bersama Filipina, Indonesia, New Zealand, dan Timor Leste. Beberapa negara yang disebutkan tersebut ada yang mendukung Papua Merdeka yaitu Solomon Island, Tuvalu, Marshall Islands, Tonga, Vanuatu dan Nauru, yang mengangkat isu Papua dalam Sidang Umum PBB. PNG merupakan salah satu mitra penting dan merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang paling berkomitmen mendukung NKRI.

Kedua, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan PNG telah terjalin dengan baik. Hubungan konsuler antara kedua negara dimulai pada tahun 1973 dan kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik pada 16 September 1975. Interaksi kedua negara selama ini secara umum berjalan baik. Dukungan PNG terhadap integritas wilayah Indonesia telah ditunjukkan dalam berbagai forum internasional seperti di PBB dan organisasi regional.



Ketiga, beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini, antara lain: a) Pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional; b) Pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak; c) Mendorong kerjasama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan; d) Kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, penyelesaiannya dilakukan melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan dilakukan melalui saluran diplomatik.

Dengan kerangka perjanjian tersebut, maka kerjasama militer PNG dengan AS tidak akan mengorbankan hubungan PNG yang sudah berjalan baik dengan Indonesia. Hal itu berbeda dengan sikap Fiji misalnya yang secara terbuka mendukung Gerakan Papua Merdeka. PM Fiji Sitiveni Rabuka dalam akun twitter menampilkan foto berjabat tangan dengan pimpinan OPM Benny Wenda dan menyatakan Fiji bersama warga Papua dalam semangat Melanesia (3/3/2023). Tentu saja hal itu menimbulkan protes keras dari Indonesia, apalagi dalam waktu dekat Fiji bermaksud membuka perwakilan di Indonesia.

Pada 6 Desember 2022, DPR mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerjasama Bidang Pertahanan. Komisi I DPR RI berpandangan, bahwa kerjasama antar negara dalam bidang pertahanan tidak hanya ditujukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada, namun juga ditujukan guna meningkatkan kemampuan industri pertahanan sebuah negara. Melalui kerjasama dengan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang sudah diakui, sebuah negara dapat belajar dan menyerap pengetahuan dan teknologi terkait pertahanan yang sudah terlebih dahulu dimiliki oleh negara lainnya melalui skema transfer teknologi.

Kondisi Papua sendiri masih dicekam sejumlah aksi kekerasan bersenjata. Data tindak kekerasan yang dihimpun Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada dari berbagai media massa sejak Januari 2010 hingga Agustus 2022 mencatat sedikitnya 2.165 korban kekerasan, di mana 1.668 di antaranya mengalami luka-luka yang sebagian besar disebabkan oleh senjata api dan senjata tajam, sedangkan sisanya 497 orang meninggal. Pola kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik semakin brutal. Selain senjata api dan senjata tajam, aksi kekerasan juga dilakukan dengan membakar pesawat terbang, rumah penduduk, kios, dan sekolah; menyiksa; melakukan penjarahan; memperkosa; dan bahkan mutilasi. Jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang tercatat. Sebab, tidak semua peristiwa terekam dan terpublikasi oleh media massa. Selain itu, banyak korban meninggal atau luka parah atau jatuh sakit di tempat penampungan karena konflik yang tak kunjung usai.



Tindak kekerasan terus meningkat di Papua dan belum ada penyelesaian yang holistik. Masyarakat di beberapa kabupaten, seperti Intan Jaya, Puncak, Nduga, Mimika, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang merupakan pihak yang paling terkena dampak atas meningkatnya intensitas aksi kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Aktor kunci dalam rangkaian kasus yang melibatkan separatis—Kelompok Kriminal Bersenjata-Kelompok Separatis Bersenjata/ Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat—Organisasi Papua Merdeka (KKB-KSB/TPNPB-OPM)—dan TNI/POLRI). Korban pun semakin meluas tidak hanya melibatkan kelompok separatis, tetapi juga masyarakat sipil, termasuk tokoh agama dan adat, tenaga kesehatan, guru dan siswa, pedagang, buruh bangunan, tukang ojek, bahkan kepala kampung dan keluarganya.

Hal itu didukung dengan fakta bahwa wilayah-wilayah tempat terjadinya tindak

kekerasan semakin merata hampir di seluruh wilayah Papua. Pada tahun 2022 (Januari-Agustus), terdapat 45 kasus kekerasan dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kabupaten Puncak sebanyak 16 kasus, disusul Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nduga masing-masing sebanyak 5 kasus, serta Kabupaten Pegunungan Bintang dengan 4 kasus. Daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi adalah Mimika (58 kasus), Intan Jaya (58 kasus), Puncak (53 kasus), Nduga (40 kasus), dan Puncak Jaya (38 kasus). Sebagai daerah dengan intensitas kekerasan tertinggi yakni, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak mencapai status tersebut hanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tingginya jumlah korban dan kerugian lainnya merupakan suatu hal yang tragis dan memilukan, bahkan meninggalkan ketakutan dan trauma yang mendalam di masyarakat serta menghambat jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Ancaman terhadap keselamatan diri dialami seluruh lapisan masyarakat, termasuk guru dan siswa, tenaga kesehatan, buruh bangunan, aparaturnya pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang tinggal di wilayah tersebut. Di titik inilah, negara seolah tidak hadir di hadapan publik di Papua. Kerawanan tersebut akan menjadi ancaman nasional, apabila dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI, baik dari dalam maupun luar negeri.

### **Perang Hegemonik di Kawasan Asia Tenggara**

Rivalitas AS dan RRC akan mempengaruhi Tata Dunia Baru dalam perspektif geopolitik dan keamanan. Untuk itu, Indonesia perlu menempatkan diri dalam posisi yang pas, menurut Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, dalam webinar diselenggarakan Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina (04/4/2023). Indonesia adalah prioritas tinggi bagi AS. Sebaliknya bagi RRC, Indonesia berada pada prioritas menengah, juga terdapat ambiguitas dimana Indonesia memposisikan RRC sebagai peluang dan ancaman.

Alutsista Indonesia sebagian besar masih berada pada blok NATO. Persepsi Indonesia terhadap RRC sebagai ancaman, tapi peluang kerjasama untuk mengembangkan ekonomi Indonesia juga

signifikan, jadi terlihat ambigu. Dalam bahasa geopolitik, kepentingan AS lebih besar di Indonesia, daripada kepentingan geopolitik RRC. Kepentingan geopolitik RRC secara global masih ada di Asia Timur, bergerak ke arah Samudera Timur yang mengarah ke Jibouti, mengarah ke negara-negara di Asia Tengah. Bagi AS, dari berbagai aspek, negara Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam memiliki prioritas tinggi.



Gubernur Lemhannas melihat hubungan antara AS dan RRC selama 73 tahun justru terakhir cenderung meningkat. Sepanjang tahun 1949 hingga 2022, relasi antara AS dan RRC cenderung bagus, hubungan keduanya berbentuk regresi linear, cenderung naik dan membaik. Skenario interaksi antara AS terhadap RRC, yaitu Skenario Persaingan Damai dan Konflik Militer. Skenario persaingan damai bertujuan untuk mendorong negara mitra mendukung AS di isu strategis, sementara pada skenario konflik militer bertujuan untuk mengalahkan RRC secara politik dan militer. Dalam persaingan damai, keluarannya adalah tidak ada pemenang tunggal, AS terus memperoleh dukungan militer dalam berbagai dinamika strategis global, sementara keluaran konflik militer yaitu terwujud kemenangan telak AS baik secara politik maupun militer. Dalam konflik militer dari friksi yang terjadi antara AS dan RRC, Indonesia justru mengkhawatirkan kalau friksi yang terjadi berlangsung singkat. Artinya, kalau friksi yang terjadi dalam waktu singkat ada gelar teknologi yang signifikan, sehingga negara-negara tersebut menjadikan one battle determined the result. Presiden Joko Widodo sendiri pada HUT TNI ke-75 tahun pernah mengingatkan untuk berhati-hati dalam karakter perang yang high technology, high level destruction.

Selain itu, perlu dipahami titik terendah hubungan antara AS dan RRC adalah saat peristiwa Tiananmen (1989) dan ketika NATO

dalam operasinya di bekas Yugoslavia membom kedutaan RRC (1999), serta pada perang Korea tahun 1951- 1953. Trendline hubungan AS dan RRC antara 2001 hingga 2021 bisa dilihat cenderung mendatar, tidak ada perkembangan yang signifikan. Terdapat kecenderungan persaingan antara AS dan RRC di Asia Timur. Secara de facto, kekuatan RRC adalah negara terkuat di Asia Timur. Hal itu dapat dilihat dari gelaran belanja pertahanan dan dari faktor energi dan FDI. Kalau dilihat belanja gelar pertahanan RRC sangat jauh dibanding dengan AS.

Secara khusus, Lemhannas mengkaji dan memprediksi perang antarnegara adidaya (hegemonic war) menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat resmi berdiri nanti akan menjadi pusat pertahanan (center of gravity) Indonesia. Ketika memberi paparan pada seminar mengenai IKN di Jakarta (25/5/2023), Andi Widjajanto menjelaskan bahwa ancaman perang terbuka tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, yaitu AS dan RRC. Dalam lima sampai sepuluh tahun lagi, kalau memikirkan mempertahankan IKN, maka perlu dipertimbangkan konteks perang hegemonik.

## POSISI IKN ANCAM KEDAULATAN NEGARA?

**Faksi Demokrat nilai letak geografis IKN mudah diserang dari utara**

- Posisinya dekat dengan FIR Malaysia dan Filipina
- Berpotensi terdampak program Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok
- Mewaspadaai pelibatan pihak asing dalam pembuatan blueprint IKN

**Terjamin aman?**

- Pemerintah sebut gunakan teknologi pertahanan modern
- Siapkan instalasi rudal pengamanan di Teluk Naga layaknya Iron Dome milik Israel
- Tegaskan kemungkinan terjadi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045

**“Kami menyajikan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Kemungkinan yang terjadi serangan bersifat CBRNE (chemical, biological, radiological, and nuclear defence)”**  
Bogat Widyatmoko, Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas

**“Ini semua berpotensi jadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN”**  
Muslim, politisi Partai Demokrat

Sumber: CNBC Indonesia, CNN Indonesia - K12  
[pinterpolitik.com](https://pinterpolitik.com) [pinterpolitikdotcom](https://pinterpolitikdotcom) [pinterpolitik](https://pinterpolitik) [pinterpolitik](https://pinterpolitik)

Konteksnya bukan RRC menyerang Indonesia, bukan pula AS menyerang Indonesia, atau bukan Malaysia menyerang

Indonesia, melainkan saat kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di level global, pertarungan geopolitik antara AS versus RRC. IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk memobilisasi serangan. Indonesia bukan menjadi mandala utama, melainkan dari Australia menuju ke mandala utamanya pasti lewat ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Sebagai solusi, Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan negara-negara bagian selatan untuk memperkuat konektivitas dan rantai pasokan global (south belt). Hal itu dibahas dalam acara "Jakarta Geopolitical Forum 2023" di Jakarta (14/6/2023), bahwa terdapat disrupsi konektivitas dan rantai pasokan global semenjak perang Rusia-Ukraina. Ditambah lagi, perang dagang dan teknologi antara AS dan RRC. Perlu dipikirkan, bagaimana caranya agar Indonesia tidak terperangkap dalam pertarungan negara-negara besar di Kawasan terdekat Asia Tenggara.

Indonesia telah memetakan negara-negara "south belt" mana saja yang akan diajak kerjasama seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian, bergeser ke Afrika, negara-negara seperti Ghana, Afrika Selatan hingga Nigeria. Negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi juga tidak ketinggalan. Dari Afrika bisa bergeser ke Amerika Latin, yang terkuat ada Brasil dan Argentina, dan beberapa komoditas strategis ada di Chile. Jika Indonesia bisa

meramu konektivitas dan rantai pasok di sabuk selatan, maka kita bisa menemukan solusi tentang konektivitas selatan. []



*Enlightenning the  
Nation*

**Center for Indonesian Reform (CIR)** is a research institution for strategy and public policy. It is also a clearing house for economic, social-politic, law and human right affairs. Established on November 30th, 2001, CIR as a nongovernmental organization works independently and impartially. CIR's Vision: To become a trusted institute for researching strategy and public policy in order to realizing the comprehensive Indonesian reform agenda. Programs and activities: 1) Reviewing strategic issues in the fields of socio-culture, economy-politics and defense-security; 2) Survey of public perceptions on service quality and the process of public policy making; 3) Monitoring actual issues in mass media coverage and conversations on social media; 4) Publish "Policy Review" journals and books related to strategic issues and public policies; and 5) Conducting Dialogues and Seminars to response problems that develop in society with sources from various backgrounds.

**Office:** Arkadia Green Park, Tower G, 8th Floor, Jl. TB Smitupang Kav. 88, South Jakarta 12520. **Phone:** +62 21 3000 6718. **Website:** [www.cir.or.id](http://www.cir.or.id)

**SECARA KHUSUS, LEMHANNAS MENKAKI DAN MEMPREDIKSI PERANG ANTARNEGARA ADIDAYA (HEGEMONIC WAR) MENJADI SALAH SATU ANCAMAN BAGI PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) YANG SAAT RESMI BERDIRI NANTI AKAN MENJADI PUSAT PERTAHANAN (CENTER OF GRAVITY) INDONESIA.**